

EFFECTIVENESS OF REPORTING ON REGIONAL GOVERNMENT IMPLEMENTATION OF TANGGAMUS DISTRICT, LAMPUNG PROVINCE

JERICO IZAL HAZALA

NPP. 29.0980

Asdaf Kabupaten Tanggamus Provinsi
Lampung Program Studi Administrasi
Pemerintahan Daerah

Email: jericoizalhazala@gmail.com

ABSTRACT

Supervisor 1 is Mrs. Dr. Rahmawati Sururama, S.STP., M.Si

Supervisor 2 is Mrs. Cynthia Febri Sri Indarti., S.IP., M.Si

Problem/Background (GAP): *The preparation of this LPPD is a routine activity carried out by each local government every year, including Tanggamus Regency, but in its implementation there are still obstacles in the preparation process. **Purpose:** this study was to determine and describe the effectiveness of the preparation of the Report on the Implementation of Regional Government in Tanggamus Regency, Lampung Province and the efforts made in overcoming the obstacles that occurred during the report preparation process. **Methods:** the research used is descriptive qualitative with an inductive approach. Data collection techniques used are interviews, observation, documentation, and triangulation/combination **Results/Findings:** this study shows that in general the preparation of the Report on the Implementation of Regional Government in Tanggamus Regency, Lampung Province has not been effective, this can be seen in terms of the preparation time which is still not in accordance with the desired target, there is no or not yet available data requested from the Section Governance of the Regional Secretariat of Tanggamus Regency, the pattern of coordination and communication has not been maximally implemented, which is more due to the difficulty of obtaining data from each regional apparatus to be submitted to the Governance Section as well as the addition of inhibiting factors such as lack of infrastructure, lack of human resources, and the absence of rewards. and punishments. **Conclusion:** the effectiveness of the preparation of reports on the implementation of local government in Tanggamus Regency, Lampung Province is still not effective based on the time of preparation, data/or information collected, and the pattern of coordination and communication carried out by administrative staff in the Governance Section and staff in each regional apparatus.*

Keywords: *Effectiveness, Report on the Implementation of Regional Government, the Governance Section of Tanggamus Regency, the preparation process.*

EFEKTIVITAS PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

Oleh: Jerico Izal Hazala

Dosen Pembimbing 1 : Dr. Rahmawati Sururama, S.STP., M.Si

Dosen Pembimbing 2 : Cynthia Febri Sri Indarti., S.IP., M.Si

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penyusunan LPPD ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh setiap pemerintahan daerah setiap tahunnya termasuk Kabupaten Tanggamus, namun pada pelaksanaannya masih menemui kendala pada proses penyusunannya. **Tujuan:** penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi selama proses penyusunan laporan. **Metode:** penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi/ gabungan. **Hasil/Temuan:** pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung belum berjalan efektif, hal tersebut dilihat segi waktu penyusunan yang masih belum sesuai dengan target yang diinginkan, tidak ada atau belum tersedianya data yang diminta dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, pola koordinasi dan komunikasi yang belum maksimal dilaksanakan yang lebih disebabkan karena sulitnya data didapatkan dari setiap perangkat daerah untuk diserahkan ke Bagian Tata Pemerintahan serta ditambahnya faktor penghambat berupa kurangnya sarana prasarana, kurangnya sumber daya manusia, dan belum adanya *reward and punishment*. **Kesimpulan:** efektivitas penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung masih belum efektif berdasarkan waktu penyusunan, data/ atau informasi yang dikumpulkan, dan pola koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh tenaga administrasi pada Bagian Tata Pemerintahan dan staf di setiap perangkat daerah.

Kata Kunci: Efektivitas, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Tanggamus, proses penyusunan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan hal wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 69 ayat (3) disebutkan bahwa kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Selanjutnya, sebagai konsekuensi bagi pemerintah daerah yang tidak menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat, dan untuk bupati/ wali kota.

Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten Tanggamus mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Mekanisme standar Pelayanan pada Proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD) Tahun 2021 diawali dari perangkat daerah membawa data pendukung sesuai dengan permintaan Indikator Kinerja Kunci, lalu petugas pelayanan berhak memeriksa kelengkapan data yang diberikan oleh perangkat daerah. Petugas menyerahkan kembali data pendukung LPPD ke perangkat daerah terkait untuk diperbaiki dan dikembalikan ke petugas penyusun LPPD. Perangkat daerah memperbaiki LPPD, setelah itu laporan tersebut diserahkan kembali ke petugas. Petugas menerima dan memeriksa hasil perbaikan kelengkapan berkas layanan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah untuk di validasi. Kasubag memvalidasi kelengkapan berkas layanan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan selanjutnya diserahkan ke provinsi untuk di verifikasi, selanjutnya Biro Otonomi Daerah Provinsi melakukan fasilitas Layanan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan mekanisme atau prosedur penyusunan Laporan tersebut, masih menemui masalah-masalah yang mengakibatkan terhambatnya proses penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Daerah. Masalah-masalah yang sering terjadi yaitu data/ informasi belum/ tidak tersedia pada setiap bagian yang menyebabkan waktu penyusunan menghadapi kendala. Data yang belum/ tidak tersedia ini akan berpengaruh pada proses perampungan Laporan pada Bagian Tata Pemerintahan padahal seyogyanya pengumpulan data sudah dipersiapkan saat tahun anggaran sudah berakhir. Masalah lainnya yaitu pada waktu, masih banyak perangkat daerah atau bagian-bagian yang terlambat dalam memberikan data/ informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD.

Permasalahan selanjutnya adalah koordinasi dan komunikasi yang belum maksimal dilaksanakan yang lebih disebabkan karena sulitnya data di dapatkan dari setiap perangkat daerah untuk diserahkan ke Bagian Tata Pemerintahan sehingga ditemui juga perangkat daerah yang sulit dihubungi untuk menyusun data yang dibutuhkan. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pelaku penyusun LPPD di setiap bagian dengan penyusun LPPD di bagian Tata Pemerintahan serta belum adanya aturan mengenai *reward and punishment* terhadap setiap bagian penyusun menjadi faktor penghambat dalam penyusunan LPPD Kabupaten Tanggamus. (wawancara melalui panggilan whatsapp dengan Ibu Susi Utami, S.E selaku tenaga administrasi pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus pada 19 Agustus 2021, pukul 19.30 WIB).

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui efektivitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus yang diselenggarakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Tanggamus, dalam hal kaitannya dengan proses penyusunan LPPD tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah untuk selanjutnya diserahkan ke bagian tata pemerintahan untuk diolah dan di satukan menjadi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tingkat Kabupaten Tanggamus. Sehingga, penelitian hanya akan terpusat pada bagian tata pemerintahannya saja dalam menyusun LPPD yang data dan informasinya bersumber dari setiap perangkat daerah/ instansi lainnya yang berhubungan dengan penyusunan LPPD.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk mengangkat masalah tersebut ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “EFEKTIVITAS PENYUSUNAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG“.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan mekanisme atau prosedur penyusunan Laporan tersebut, masih menemui masalah-masalah yang mengakibatkan terhambatnya proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Daerah. Masalah-masalah yang sering terjadi yaitu data/ informasi belum/ tidak tersedia pada setiap bagian yang menyebabkan waktu penyusunan menghadapi kendala. Data yang belum/ tidak tersedia ini akan berpengaruh pada proses perampungan Laporan pada Bagian Tata Pemerintahan padahal seyogyanya pengumpulan data sudah dipersiapkan saat tahun anggaran sudah berakhir. Masalah lainnya yaitu pada waktu, masih banyak perangkat daerah atau bagian-bagian yang terlambat dalam memberikan data/ informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD.

Permasalahan selanjutnya adalah koordinasi dan komunikasi yang belum maksimal dilaksanakan yang lebih disebabkan karena sulitnya data di dapatkan dari setiap perangkat daerah untuk diserahkan ke Bagian Tata Pemerintahan sehingga ditemui juga perangkat daerah yang sulit dihubungi untuk menyusun data yang dibutuhkan. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pelaku penyusun LPPD di setiap bagian dengan penyusun LPPD di bagian Tata Pemerintahan serta belum adanya aturan mengenai *reward and punishment* terhadap setiap bagian penyusun menjadi faktor penghambat dalam penyusunan LPPD Kabupaten Tanggamus. (wawancara melalui panggilan whatsapp dengan Ibu Susi Utami, S.E selaku tenaga administrasi pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus pada 19 Agustus 2021, pukul 19.30 WIB).

II. Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti, Judul, Tahun.	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Sekretariat Daerah Minahasa Selatan. oleh Henry Nelson Momuat, Jetty EH Mokat, Fitri H Mamonto pada 2020.	Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	bagaimana proses LPPD di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa serta hambatan yang ditemui dalam penyusunannya	yaitu proses penyusunan LPPD di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan belum sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal
2	Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kota Metro. dilakukan oleh Elip Helda, Malik Malik, Ade Thiya Delisa	Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	fokus penelitian pada hambatan-hambatan dalam penyusunan LPPD	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan LPPD di Kota Metro Telah berjalan dengan baik, ditunjukkan bahwa dalam 2 tahun terakhir Kota Metro mampu mendapatkan kategori terbaik I (2018) dan terbaik II (2017) dari Kementerian Dalam Negeri dan walaupun dihadapi dengan hambatan yang terjadi yaitu pada faktor struktur birokrasi dan faktor disposisi.

2.1. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu. Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis memanfaatkan kejadian yang aktual serta informan yang dapat dipercaya. GAP penelitian juga tersedia dan menjadi masalah yang terjadi di tempat penelitian penulis.

Tujuan.

Adapun tujuan yang hendak diwujudkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.
- 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.
- 3) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus dalam mengatasi hambatan pada penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

III. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan melalui kata-kata secara sistematis dan akurat terhadap fakta-fakta/ fenomena/ gejala-gejala yang terjadi di lapangan kemudian ditarik kesimpulan untuk memahami makna penelitian yang diangkat oleh peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan melalui kata-kata dalam melihat keefektivitasan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, sehingga akan dilihat mengenai fenomena-fenomena/ gejala yang terjadi dalam proses penyusunannya.

Menurut Sugiyono (2013:225) menyebutkan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/ triangulasi. Berdasarkan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi,

dokumentasi, dan gabungan/ triangulasi.

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013:246) aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus, sehingga datanya jenuh yang melalui beberapa tahapan yaitu *data reduction* (Reduksi data), *data display* (Penyajian data), dan *drawing/ verification*

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan membahas mengenai efektivitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung berdasarkan teori dari Duncan dalam Steers (1985:53) mengenai ukuran-ukuran efektivitas yang diuraikan menjadi 3 (tiga) dimensi yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi serta setiap dimensi terbagi atas beberapa indikator yaitu dimensi pencapaian tujuan dengan indikator waktu penyusunan LPPD, dasar hukum pelaksanaan, Dokumen LPPD Kabupaten Tanggamus, dan sumber data dari perangkat daerah, dimensi integrasi dengan indikator mekanisme atau prosedur laporan dan koordinasi dan komunikasi antar pihak, serta dimensi adaptasi dengan indikator kemampuan penyusun dalam merampungkan dokumen LPPD dan sarana prasarana penunjang kegiatan. Adapun hasil analisis per indikator nya adalah sebagai berikut:

4.1 Pencapaian Tujuan

Keseluruhan pencapaian tujuan harus dipandang sebagai sebuah proses, oleh karena itu agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin diperlukan berbagai tahapan-tahapan. Dalam melihat dimensi pencapaian tujuan ini ada beberapa indikator yang digunakan yaitu waktu penyusunan LPPD, dasar hukum pelaksanaan, Dokumen LPPD Kabupaten Tanggamus, dan sumber data dari setiap perangkat daerah.

1. Waktu Penyusunan LPPD

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam segi waktu penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung ini belum secara maksimal atau belum mencapai target yang diinginkan terlihat masih sulitnya data yang dikumpulkan setiap perangkat daerah kepada bagian tata pemerintahan yang menyebabkan waktu penyusunan menjadi terlambat.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk dasar hukum yang mengaturnya sudah ada yaitu menggunakan dasar hukum peraturan dari pusat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sedangkan untuk Peraturan Daerah yang mengatur penyusunan LPPD ini belum diatur di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, namun dari segi proses penyusunannya diatur mengenai SK Tim penyusunan LPPD dan juga diatur mengenai SK Tim Asistensi Penyusunan LPPD.

3. Dokumen LPPD Kabupaten Tanggamus

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tersebut serta pengamatan peneliti pada saat pelaksanaan proses penelitian dapat disimpulkan bahwa Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus merupakan bagian yang menyusun dokumen LPPD ini yang sumber datanya dari setiap perangkat daerah atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setelah masa 1 (satu) tahun anggaran sehingga dihasilkan suatu dokumen LPPD Kabupaten Tanggamus setiap tahunnya, dimana dokumen LPPD tahun terakhir yang dibuat adalah pada tahun 2020 yang disusun pada tahun 2021 kemarin.

4. Sumber Data Dari Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penyusunan LPPD tiap tahunnya selalu menemui permasalahan atau kendala dalam penyusunannya. Permasalahan yang sering dijumpai tersebut yaitu data atau informasi yang belum atau tidak tersedia pada setiap perangkat daerah sehingga akan menyebabkan keterlambatan waktu penyusunan serta tidak adanya data yang dibutuhkan Bagian Tata Pemerintahan. Berikut disajikan data penyampaian berkas LPPD Tahun 2020 setiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus.

4.2 Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Dalam melihat dimensi Integrasi ini ada beberapa indikator yang digunakan yaitu mekanisme atau prosedur laporan dan koordinasi dan komunikasi antar pihak.

1. Mekanisme atau Prosedur Laporan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa dalam proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun memang dalam proses penelitian yang dilakukan ini berlangsung pada awal bulan Januari 2022 sehingga penulis tidak dapat melihat langsung proses penyusunan LPPD tersebut yang baru akan di mulai pada Bulan Februari. Berikut disajikan data tabel berupa mekanisme atau prosedur layanan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2 Koordinasi Dan Komunikasi Antar Pihak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tersebut serta pengamatan peneliti pada saat pelaksanaan proses penelitian dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi dan koordinasi antara petugas penyusun di bagian tata pemerintahan dengan petugas penyusun dari setiap perangkat daerah itu sudah berjalan namun, memang terdapat kendala sehingga pola komunikasi dan koordinasi yang berjalan mengalami kendala walaupun dalam prosesnya tetap mengumpulkan data yang diminta ke bagian tata pemerintahan.

4.3 Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, untuk itu digunakan tolak ukur pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Dalam melihat dimensi Adaptasi ini ada beberapa indikator yang digunakan yaitu kemampuan penyusun dalam merampungkan dokumen LPPD dan sarana prasarana penunjang kegiatan.

1. Kemampuan Penyusun Dalam Merampungkan Dokumen LPPD

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tersebut serta pengamatan peneliti pada saat pelaksanaan proses penelitian dapat disimpulkan bahwa secara kemampuan personil bagian tata pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan sudah baik dan dapat menunjang kegiatan-kegiatan yang ada di bagian tata pemerintahan.

2. Sarana Dan Prasarana Penunjang Kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tersebut serta pengamatan peneliti pada saat pelaksanaan proses penelitian dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di bagian tata pemerintahan tersebut perlu di tambah fasilitas kerjanya guna mendukung dan menunjang setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap pegawai yang ada sehingga pegawai dapat maksimal dalam bekerja.

pada penelitian ini juga terdapat beberapa hambatan dalam penyusunan LPPD di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, yang diuraikan sebagai berikut;

- 1) Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di bagian tata pemerintahan tersebut perlu di tambah fasilitas kerjanya guna mendukung dan menunjang setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap pegawai yang ada sehingga pegawai dapat maksimal dalam bekerja.
- 2) Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung antara lain yaitu kurangnya SDM yang ada di Bagian Tata Pemerintahan dalam mendukung pekerjaan yang dilakukan serta ditambah banyaknya kegiatan yang ada di Bagian Tata Pemerintahan.
- 3) Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung antara lain yaitu belum diaturnya mengenai pemberian *reward and punishment* bagi setiap perangkat daerah terkait maupun bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten.

Dalam menghadapi berbagai hambatan yang terjadi tersebut, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut;

- 1) Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung adalah penambahan fasilitas kerja seperti laptop dengan harapan dapat meningkatkan semangat pegawai dalam bekerja lebih maksimal khususnya dalam proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi

Lampung.

- 2) Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung adalah dengan menambah jumlah sumber daya manusia yang ada di Bagian Tata Pemerintahan karena memang kegiatan yang cukup padat serta ditambah adanya pegawai yang baru mengalami mutasi dan ada juga yang pindah ke daerah lain sehingga perlu ditingkatkan lagi jumlah pegawai yang ada tersebut guna memaksimalkan setiap pekerjaan yang dilakukan.
- 3) Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung adalah dengan membuat aturan mengenai *reward and punishment* yang diatur oleh pemerintah daerah sehingga penyusunan LPPD ini menjadi perhatian penting bagi setiap perangkat daerah yang menyusun laporan ke Bagian Tata Pemerintahan sehingga dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dapat berjalan dengan efektif kedepannya.

4.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Selama pelaksanaan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa temuan penting dalam proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung yaitu personil yang ada pada bagian tata pemerintahan selaku penyusun laporan dari berbagai perangkat daerah, staf yang ada pada berbagai perangkat daerah yang menyerahkan data / informasi ke bagian tata pemerintahan, serta data/ informasi yang menjadi hal utama dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dikemukakan oleh peneliti pada bab sebelumnya dalam laporan skripsi ini, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung masih belum berjalan secara efektif hal ini dapat dilihat dari segi waktu penyusunan yang masih belum sesuai dengan target yang diinginkan, tidak ada atau belum tersedianya data yang diminta dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, pola koordinasi dan komunikasi yang belum maksimal dilaksanakan yang lebih disebabkan karena sulitnya data didapatkan dari setiap perangkat daerah untuk diserahkan ke Bagian Tata Pemerintahan. Fasilitas yang ada juga masih dirasakan kurang oleh pegawai sehingga dapat menghambat kinerja pegawai yang ada.
2. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung masih menemui hambatan dalam pelaksanaannya sehingga penyusunan nya belum berjalan efektif. Hambatan yang terjadi tersebut yaitu kondisi sarana dan prasarana yang masih kurang dan perlu penambahan fasilitas seperti laptop, kurangnya sumber daya manusia, dan belum diaturnya mengenai pemberian *reward and punishment* bagi setiap perangkat daerah yang ada di Kabupaten Tanggamus.
3. Berdasarkan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menjawab setiap hambatan yang terjadi tersebut yaitu meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan jumlah sumber daya manusia, dan membuat *reward and punishment* bagi setiap perangkat daerah pada bagian tata pemerintahan.

VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghormatan tak terhingga kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, civitas akademika IPDN, keluarga serta seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VII. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arindya, Radita. 2019. *Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Drucker, Peter F. 2009. *The effective Executive*. Jakarta: Serambi.
- Mahmudi. 2020. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Moenir. 2008. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metedologi Penelitian Pemerintahan (Teoriti, Legalistik, Empirik, Inovatif)*. Bandung: Alfabeta.
- Steer, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi Kaidah Prilaku (Alih Bahasa Magdalena)*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2015. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Bentuk

dan Kedaulatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.

Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5.27/09/08/2021 Tentang Panitia Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021.

C. Jurnal-Jurnal

Momuat, H., Nelson., Mokat, J.E.H., & Mamonto, Fitri., H. (2020). Impelmentasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Sekretariat Daerah Minahasa Selatan. *Jurnal Politico* 9 (1). 1-14. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/30457>

Nurhasanah, NurmahSemil, & Taufik Akhyar. (2020). Efektivitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 25. No 2, 82-102. <https://ejournal.candradimukamap.ac.id/index.php/JAP/article/view/21>

Heldan, Elip., Malik, Malik., & Delisa, A. Thiya. (2020). Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kota Metro. *E-jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik*. Vol 6. No. 3. <https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/ejkpp/article/view/1927>